SENSUS PENDUDUK 2000: REFORMASI KUALITAS DATA DAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Oleh: Ir. Budi Setiawan

Kegiatan Sensus Penduduk 2000 sudah memasuki kegiatan yang ke-lima kalinya di negara kita. Setelah empat kali dilaksanakan Sensus Penduduk, maka SP 2000 ini menjadi momentum yang sangat strategis dalam menciptakan perolehan kualitas data dan informasi sejalan dengan era perkembangan Reformasi di tubuh pemerintahan khususnya dalam pengelolaan administrasi kependudukan di Negara kita. Dari ke-empat kali sensus yang sudah dilakukan selama ini belum sepenuhnya memenuhi harapan dan tuntutan akan kualitas data yang kita inginkan, untuk itu dari bentuk kuesioner yang ada dalam SP 2000 ini kita berharap akan terwujud cita-cita kita bersama untuk mendapatkan data dan informasi yang memenuhi ketentuan seperti mempunyai Presisi yang tinggi, Relevansi Data, Reliabilitas, dan Validitas yang dapat diandalkan.

Perjalanan panjang dalam upaya meningkatkan kualitas data statistik di Indonesia melalui kegiatan Sensus Penduduk sudah memasuki kegiatan yang ke-lima kalinya, hal ini ditandai dengan pelaksanaan Sensus Penduduk 2000 yang telah dilaksanakan tanggal 1 Juni 2000 sampai dengan 30 Juni 2000. Setelah empat kali dilaksanakan selama berdirinya republik ini yaitu Sensus Penduduk tahun 1961, Sensus Penduduk tahun 1971, Sensus Penduduk tahun 1980, dan Sensus Penduduk 1990, maka Sensus Penduduk 2000 sekarang ini akan menjadi momentum yang sangat strategis dan merupakan sensus yang pertama kali dalam era milenium ke-tiga. Sensus Penduduk merupakan siklus kegiatan sepuluh tahun-an yang dilaksanakan oleh jajaran Badan Pusat Statistik yang dulu lebih dikenal dengan nama Biro Pusat Statistik. Dari kegiatan yang telah dilakukan selama ini, belum menunjukkan

hasil kinerja yang optimal khususnya dari empat kali kegiatan yang sudah dilakukan. Beberapa hal yang mungkin menjadi argumentasi pada saat itu adalah karena kuatnya bentuk dominasi perencanaan pembangunan yang masih dilakukan berdasarkan kewenangan kekuasaan semata dan masih berada di tangan pemerintah dengan kebijakannya yang bersifat Top-Down, dan mengesampingkan warga negara (public sector) dalam membuat usulan perencanaan pembangunan (Pergeseran dari pandangan lama yang lebih berorientasi kepada Government Centered, mulai berubah ke arah Public Centered). Berbagai pergeseran di sektor pemerintahan saat ini telah mulai dilaksanakan melalui gerakan reformasi diberbagai sektor kelembagaan pemerintahan. David Osborn dan Peter Plastrik (1996) telah mengidentifikasi berbagai bentuk pergeseran tersebut dimulai dari:

- Desentralisasi wewenang dalam unit-unit pemerintahan dan penyerahan tanggung jawab sampai tingkat-tingkat rendah di pemerintahan;
- Mengkaji kembali apa yang seharusnya dilakukan dan dibiayai, apa yang dibiayai tapi tidak untuk dilakukan, dan apa yang seharusnya tidak dilakukan dan dibiayai;
- Perampingan pelayanan publik serta privatisasi dan swastanisasi kegiatan;
- Mempertimbangkan cara pembelian pelayanan secara lebih efektif sesuai biaya, seperti kontrak keluar, mekanisme pasar, dan pembebanan kepada pengguna;
- Orientasi pelanggan, termasuk standar mutu yang eksplisit untuk pelayanan publik;
- Benchmarking dan pengukuran kinerja; dan
- Reformasi yang dirancang untuk menyederhanakan peraturan dan mengurangi biaya-biayanya.

Dari keadaan empat kali sensus telah kita rasakan selama ini, kualitas data yang dihasilkan masih memfokuskan pada kepentingan sektor pemerintah pusat, dan keadaannya belum menyentuh kondisi (profil) data yang ada di daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota atau mungkin lebih mendalam lagi untuk kepentingan sektor Kecamatan maupun Desa. Hal ini belum dapat membantu dalam menunjang program pemerintah secara keseluruhan khususnya untuk melaksanakan program otonomi daerah yang menjadi topik kajian dan merupakan permasalahan krusial dewasa ini. Dan yang lebih penting lagi berbagai identifikasi tentang pergeseran di sektor pemerintah ini jelas akan menjadi hambatan, karena tidak ditunjang oleh kondisi data dan informasi yang meyakinkan dan memenuhi standar kebutuhan para pemakainya.

Hakikat yang perlu kita pahami bersama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah diberikannya kewenangan yang lebih besar dari pusat kepada daerah untuk menyelenggarakan mekanisme keuangan, politik, kekuasaan dan memberdayakan sumber daya yang ada di daerah. Hal ini sangat memungkinkan sekali bagi daerah untuk melakukan perencanaan, program dan agenda pembangunan yang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dengan demikian berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten/Kota akan lebih menyentuh kebutuhan rakyat, bukan merupakan hasil rekayasa dari pusat untuk memasukan proyek-proyek (program) yang didesain dari pusat agar diselenggarakan di daerah. Model kegiatan selama masa kepemimpinan orde baru yang telah berlangsung selama 32 tahun, dengan sendirinya akan terkikis dan tidak menjadi model trend yang telah menjadi standar kerja selama ini. Telah kita rasakan bersama bagaimana pembangunan yang ada pada saat ini tidak sepenuhnya menyentuh harapan banyak rakyat, karena masih terdapat beberapa prasarana umum yang tidak membidik langsung keinginan masyarakat yang ada di masing-masing wilayah. Sekolah-sekolah dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkat yang tertinggi seperti; Sekolah Dasar, SLTP, SLTA dan pembangunan-pembangunan lainnya seperti pembuatan tempat MCK (Mandi, Cuci dan Kakus), ada sebagian yang mubazir karena siswa-siswa yang akan menduduki bangku sekolah tersebut jumlahnya lebih sedikit dari jumlah kursi yang tersedia atau sebaliknya. Hal tersebut disebabkan oleh perencanaan pembangunan yang belum mengakomodasikan atau memperhatikan sejauhmana kebutuhan untuk berbagai fasilitas umum dan fasilitas penunjang lainnya di daerah.

Keterkejutan kita tentunya tidak akan berlangsung lama, karena dengan melihat kondisi-kondisi yang ada seperti sekarang ini tidak ada satu daerah pun di Kabupaten/Kota yang mempunyai data statistik akurat yang sesuai dengan harapan serta keinginan para perencana dalam pembuatan program-program pembangunan di daerah. Kita tidak menutup mata, memang masih ada sumber-sumber data/informasi lain yang telah menggambarkan keadaan masyarakat dan sering di ekspose di berbagai media masa maupun media elektronik yaitu hasil pendataan keluarga misalnya banyaknya keluarga sejahtera, pra-sejahtera, sejahtera I, dan lain sebagainya. Namun kesemuanya ini belum menggambarkan kondisi konkrit data yang sebenarnya, Para Pakar di bidang Statistika mengetahui bahwa walaupun pada tingkatan konsep, definisi dan variabel yang digunakan masuk akal, tetapi dalam tataran standar prosedur metodologi penelitian masih jauh dari layak dan dalam istilah baku yang sering digunakan adalah data tersebut validitas dan reliabilitas masih banyak dipertanyakan serta masih memungkinkan untuk menjadi bahan perdebatan yang sulit mendapatkan titik temu.

Para peminat dan pengguna data demografi, mungkin merasa kaget, tetapi ini realitas nyata yang tidak dapat kita pungkiri bahwa tidak ada satu kecamatan apalagi desa di seluruh Indonesia ini yang mengetahui berapa tingkat pengangguran di wilayahnya, bagaimana tingkat pendidikan sumber daya manusia yang ada, berapa banyak orang yang buta huruf, dan berapa orang yang bekerja menurut sektor-sektor pekerjaan yang ada, jenis-jenis pekerjaan, status pekerjaan, dan beberapa informasi-informasi kuantitatif lainnya yang akan mendukung program perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang untuk

masing-masing wilayah. Keberadaan informasi kuantitatif yang seperti ini justru sangat dibutuhkan sekali baik oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi, maupun oleh pihak LSM-LSM yang bergerak diberbagai bidang yang banyak bersinggungan dengan permasalahan kependudukan dan pemberdayaan masyarakat, dan yang lebih penting lagi sangat dibutuhkan dalam rangka membuat perencanaan pembangunan wilayah kecil (*small spatial for development planning*). Berbagai pertanyaanpun terus mengalir di benak kita, bagaimana dengan otonomi daerah yang akan dilaksanakan serempak di beberapa wilayah pada tahun 2001 bila dukungan data yang sedemikian penting ini tidak tersedia, padahal dengan pemberdayaan masyarakat melalui perubahan dan pembenahan struktur masyarakat yang didasari pada Undang-undang dan dengan dipertegasnya Desa memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat, tentunya pengenalan situasi objektif masyarakat perlu menjadi perhatian yang lebih penting.

Menyimak kondisi yang ada saat ini, maka berbagai informasi demografi yang telah dihasilkan jenis-jenis informasinya masih sangat terbatas. Data ketenagakerjaan, pendidikan, kelahiran dan kematian, migrasi, dan data sosial-demografi lainnya, telah dikumpulkan melalui sensus yang agregasi penyajiannya hanya diperuntukkan untuk tingkat nasional, propinsi dan sebagian kecil (variabel) untuk kabupaten/kota. Dengan demikian, bagaimana kita akan dapat berbicara banyak tentang kondisi sosial-demografi yang ada di kecamatan apalagi di desa karena sepanjang sejarah Indonesia merdeka hal-hal yang seperti ini belum tersentuh.

Momentum SP 2000 ini akan menjadi sangat strategis dan menjadi cukup bermakna, bilamana berbagai permasalahan tadi menjadi bahan pemikiran khususnya dalam penyediaan data statistik untuk wilayah kecil (kecamatan/desa). Hasilnya diharapkan akan dapat menyelamatkan daerah kita dari kemubaziran pembangunan, karena berbagai program yang direncanakan betul-betul merupakan harapan rakyat dan bukan menjadi vested interest bagi elit politik yang ada di tingkat pusat maupun di daerah. Beberapa variabel kunci yang diharapkan akan muncul dari hasil SP 2000 bulan Juni ini adalah terpenuhinya berbagai kebutuhan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan wilayah kecil yang tampaknya akan sangat bernilai dan strategis, antara lain tersedianya data struktur lapangan pekerjaan penduduk, struktur jenis dan status pekerjaan, data kelahiran dan kematian, tingkat pendidikan yang telah diselesaikan, kemampuan baca-tulis, data jumlah rumah dan bangunan berikut kualitas perumahan tempat tinggal penduduk. Variasi data yang seperti ini akan mampu mencerminkan situasi, potensi, dan kecenderungan kualitas sumber daya manusia serta aktivitasnya di setiap wilayah di seluruh Indonesia.

Berbagai informasi statistik lainnya dari hasil SP 2000 ini akan pula menggambarkan indikasi awal tentang perbandingan kualitas sumber daya manusia untuk penduduk berdasarkan jenis kelamin. Dengan demikian isu gender yang sedang merebak dan menjadi isu sentral dalam berbagai bentuk kajian sekarang ini, serta berkaitan dengan upaya peningkatan peran perempuan yang lebih tergambar dengan jelas, akan memperoleh pijakan fakta dan data yang lengkap dalam rangka menemukan berbagai kebijakan maupun strategi untuk melakukan langkah

penanganan lebih lanjut. Data dan informasi tentang gender ini akan sangat bermanfaat bagi daerah dalam rangka memperkecil bias gender yang terjadi dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan terutama di kawasan-kawasan terpencil atau dilokasi-lokasi yang selama ini tidak terjangkau oleh penginderaan kita (seperti misalnya; permukiman kumuh perkotaan, daerah aliran sungai, kawasan industri, kawasan pantai dan lain sebagainya). Data gender ini pula yang membantu mengantisipasi terjadinya eksploitasi suatu gender oleh gender lainnya, kondisi seperti ini tentunya tidak mendukung proses pembangunan yang bertemanan pemberdayaan masyarakat tanpa memandang dan memperhatikan kualitas dari jenis kelamin.

Data tentang masalah mobilitas penduduk dari SP 2000 ini adalah data mobilitas permanen selama lima tahun terakhir. Dengan menggunakan batasan ruang pindah (migration defining region) yang akan menjadi bahan pijakan, kita dapat melakukan estimasi secara menyeluruh tentang data migrasi antar daerah kabupaten/kota, dengan demikian data migrasi antar daerah akan dapat diperoleh dan tidak menjadi persoalan besar untuk mengetahui daerah-daerah mana saja yang atraktif menjadi objek sasaran migrasi masyarakat selama ini. Hal ini dapat pula dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk daerah-daerah mana saja yang justru cenderung ditinggalkan oleh penduduknya. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah dimana ada kecenderungan etnosentrisme (berkum-pulnya kelompok etnis tertentu di suatu wilayah) yang sekarang ini tumbuh di beberapa daerah, maka dengan dukungan data mutakhir tentang volume, arus dan kecenderungan migrasi ini akan sangat membantu dalam penciptaan kebijakan nasional dan daerah yang komprehensif mengenai

bagaimana seharusnya daerah memperlakukan para migran tersebut bagi kepentingan di masing-masing daerahnya.

Kualitas data yang baik tentunya akan menghasilkan informasi yang baik pula, berbagai upaya yang sekarang ini seharusnya dilakukan adalah bagaimana para praktisi yang berkecimpung di bidang pengumpulan dan pengolahan data dapat menyumbangkan kontribusi pemikiran yang sebesar-besarnya agar target perolehan data akan memiliki standar kualitas yang mumpuni dan harus memenuhi persyaratan bahwa data tersebut mempunyai standar kualitas dari mulai presisi yang tinggi, validitas yang dapat dipercaya, reliabilitas yang dapat diandalkan serta relevansi data yang memadai sehingga dalamjangkauan waktu tertentu masih dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan bagi administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan pada umumnya.

Melihat berbagai kenyataan yang ada saat ini dalam konteks pemanfaatan data sebagai bahan mentah untuk diolah menjadi informasi, maka dukungan dari pemerintah perlu untuk terus diupayakan. Program-program penelitian dan pengembangan untuk peningkatan kualitas data dan informasi ini tidak selamanya harus bergantung kepada lembaga/institusi pemerintah, akan tetapi sektor swastapun yang selama ini bergerak dalam bidang yang sama untuk terus diberdayakan. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan informasi yang akurat karena ditunjang oleh kualitas pendidikan masyarakat yang semakin baik, maka tuntutan akan keberadaan data yang mampu memenuhi standar kualitas yang memadai menjadi sesuatu yang tidak bisa di tawar-tawar lagi. Dengan demikian berbagai kebutuhan instansi/lembaga baik dilingkungan

pemerintah, swasta, maupun dunia pendidikan dan berbagai individu yang bergerak pada masing-masing bidang kajian yang beragam selamanya akan terdukung dengan bantuan kualitas data yang baik dari hasil Sensus Penduduk 2000 ini.

Berbagai harapan-harapan yang telah dikemukakan tadi telah menjadi angan-angan kita semua dan semoga saja harapan tersebut akan menjadi kenyataan, karena tanpa dukungan data yang baik, kekeliruan pada masa-masa lalu akan berulang kembali yang pada gilirannya cita-cita rakyat indonesia yang mendambakan terciptanya masyarakat yang berpendidikan, berbudaya dan berkeadilan akan segera terlaksana. Reformasi total yang menjadi dambaan kita semua tidak hanya memfokuskan pada permasalahan sosial, politik dan ekonomi saja, akan tetapi harus memperhatikan pula aspek-aspek lain seperti halnya reformasi dalam menciptakan kualitas data yang memadai khususnya melalui proses pengumpulan data dalam bentuk kegiatan Sensus Penduduk 2000. Berbagai permasalahan sosial, ekonomi dan politik yang selama ini terjadi diharapkan akan dapat terjawab akar permasalahannya melalui dukungan data dan informasi kauntitatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, SP 2000, Jakarta, 2000
David Osborn dan Peter Plastrik, *Memangkas Birokrasi*, LPPM, 1997
Davis, B. Gordon, *Sistem Informasi Manajemen*, LPPM, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1984
Sudjana, *Metoda Statistika*, Tarsito, Bandung, 1996

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintah Daerah, CV. Eko Jaya, Jakarta,
1999.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
Daerah, CV. Eko Jaya, Jakarta, 1999